**Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah**

**Ari Nurul Fatimah**

ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

**Nuwun Priyono**

nuwunpriyono@untidar.ac.id

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

***Abstract***

*The change from a centralized system to a decentralized give new hope for most Indonesians. With a decentralized government administration or delegating a large part of the authority to the regional government, the government management authority will be distributed from the center to the regions. The purpose of this study will be to study and finance (PAD) and balance funds consisting of: Revenue Sharing (DBH), DAU and DAK as well as regional expenditure consisting of: capital expenditure ratios, GRDP expenditure ratios, and regional financial performance in districts / cities in Central Java Province. This study uses secondary data types using time series data, namely the period 2015-2018. The data used are all districts and cities in Central Java, namely 29 districts and 6 cities. APBD realization report data obtained from the Directorate General of financial balance. In addition to data obtained through the following website: www.djpk.kemenkeu.go.id, and www.bps.go.id. Hypothesis testing is done by using multiple regression analysis models. The results of this study are PAD, DAU, and GDP ratio have a significant effect on people's welfare. This study supports several studies that have supported research that is consistent with this study.*

*Keywords: PAD; Balance Funds; Expenditures; Community Welfare*

**Abstrak**

Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi menaruh harapan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan pengelolaan pemerintahan yang terdesentralisasi atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, maka kewenangan pengelolaan pemerintahan akan dapat terdistribusi dari pusat kepada daerah. Tujuan penelitian ini akan mengkaji dan membuktian apakah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), DAU dan DAK dan belanja daerah yang terdiri dari : rasio belanja modal, rasio belanja PDRB, dn rasio pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan menggunakan data *time series* yaitu periode tahun 2015-2018. Data yan digunakan yaitu seluruh populasi kabupaten dan kota di Jawa Tengah yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Data laporan realisasi APBD didapat dari Direktorat jenderal perimbangan keuangan. Selain itu data diperoleh melalui *website* berikut ini: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda, Hasil dari penelitian ini yaitu PAD, DAU, dan rasio belanja PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini telah mendukung beberapa penelitian terdahulu yang sudah memberikan hasil yang selaras dengan penelitian ini.

Kata kunci: PAD; Dana Perimbangan; Belanja; Kesejahteraan Masyarakat

**PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan pemerintah yang memiliki kemampuan professional. Selain itu, pembangunan daerah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat sehingga terwujudnya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata (Aditya & Maryono, 2018). Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiscal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana pusat dalam melakukan pelayan public dan pembangunan (Kustianingsih & Muslimin dan Abdul Kahar, 2018).

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk dari tata kelola pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel. Masyarakat daerah mempunyai implikasi bahwa pemerintah dapat memberikan informasi keuangan yaitu salah satunya berbentuk laporan keuangan. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan pada umumnya. Keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Laporan keuangan pemeritah daerah berbasis anggaran sehingga kinerja keuangan dapat dinilai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasai Anggaran (LRA) (Suranta, Bandi, Syafiqurrahman, & Perdana, 2018).

Kebijakan otonomi daerah sudah diimplementasikan hampir 20 tahun. Otonomi daerah sudah dimulai sejak adanya paket undang-undang otonomi daerah yaitu: Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian telah diubah melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dengan digulirkannya kedua paket undang-undang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memasuki babak baru dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Sistem pemerintahan berubah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi (otonomi daerah). Perjalanan implementasi sistem otonomi daerah ditandai dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Hal tersebut merubah sebagian besar aspek pengelolaan keuangan negara, terutama keuangan pemerintah daerah.

Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi menaruh harapan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan pengelolaan pemerintahan yang terdesentralisasi atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, maka kewenangan pengelolaan pemerintahan akan dapat terdistribusi dari pusat kepada daerah. Berbagai aspek pengelolaan pemerintahan yang didistribusikan termasuk aspek keuangan.

Pengelolaaan keuangan yang terdesentralisi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal akan dapat mengurangi kesenjangan/ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sedangkan secara horizontal akan mengurangi ketimpangan keuangan antar pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lainnya. Desentraliasi pemerintah daerah kapubaten dan kota menunjukkan kemampuannya dalam pengelolaan terhadap daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang perlu ditindaklanjuti secara tanggungjawab penuh (Badjra, Mustanda, & Abundanti, 2017).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting dalam proses penilaian kerja pemerintah karena masyarakat sebagai pemberi dana public. Masyarakat membayar pajak daerah untuk kepentingan pembangunan daerah. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan public. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan yang mencerminkan arah pembangunan daerah. Belanja daerah perlu dievaluasi penggunaannya untuk mengetahui pertumbuhan suatu daerah tersebut (Deviani, 2016). Setiap tahun pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan peran alokatif. Pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sector yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi (Deswantoro, Ismail, & Hendarmin, 2017). Penyusunan anggaran yang tepat akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan pengalokasian belanja modal secara tepat sehingga kebutuhan suatu daerah dapat terpenuhi (Arini Sita, 2017).

Propinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang strategis karena terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Hal tersebut menjadikan Propinsi Jawa tengah menjadi Kawasan pusat kegiatan ekonomi antara pengemabngan Kawasan barat dan Kawasan timur. Selain itu, wilayah tersebut mempunyai jalur pelayaran nasional dan internasional sehingga memungkinkan untuk Jawa Tengah dapat memperluas jaringan perdagangan antar kota. Jawa Tengah juga memiliki potensi di sector pertanian, perkebunan, industri, dan perikanan. Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang penggunaan alokasi anggaran APBN di seluruh wilayah Jawa Tengah (Badan Anggaran DPR RI, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini akan mengkaji dan membuktian apakah (PAD), dana perimbangan, belanja daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah terutama PAD dan dana perimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah. Kemudian penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan lebih lanjut bagi penelitian di bidang akuntansi sektor public khususnya keuangan daerah.

**KAJIAN TEORI**

**Teori Agency**

Teori agensi berusaha untuk menjelaskan hubungan antara agen dan principal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Kontrak tersebut terdiri dari agen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab dan principal sebagai pihak yang memberi tugas. Ada dua masalah agensi yang dapat diselesaikan yaitu ketika tujuan antara agen dan principal bertentangan dan ketika masalah *risk sharing* yang terjadi pada sikap yang berbeda pada suatu resiko. Anggaran merupakan salah stau sistem perencanaan dan pengawasan jalannya operasional pemerintahan yang dapat dilakukan secra efisien dan efektif. Teori keagenan dalam penyusunan APBD behubungan degan eksekutif sebagai agen dan masyarakat sebagai principal (Ratnadi, Ariyanto, & Wirawati, 2016).

Teori keagenan dapat diterapkan pada sector public yaitu melalui hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari penyusunan anggaran. Pemerintah pusat menyusun anggaran yang kemudian didistribusikan ke pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran tersebut. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit meripakan bentuk dari kontrak antara eksekutif, legislative, dan public. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan public. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislative untuk didiskusikan Bersama sebelum diterapkan sebagai peraturan daerah. Hal tersebut merupakan bentuk kontrak yang menjadi alat bagi legislative untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. Dengan demikan, kontrak yang dilakukan tersebut dapat mendukung perspektif keagenan (Zelmiyanti, 2016)

**Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Hubungan keuangan pusat dan daerah mempunyai tujuan yaitu adanya pembagian kekuasaan tingkat-tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintahan yaitu pembagian yang sesuai dengan pola desentralisasi. Selain itu pembagian yang memadai dari sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara.

Pola pembiayaan terhadap wewenang yang dilimpahkan oleh pusat kepada daerah sebagian besar diperoleh dari pendapatan asli daerah. Salah satu bentuk dari pembiayaan tersebut yaitu dengan pemberian sumber dana yang berkaitan dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan anggaran yang sebanding dengan kegiatan yang dijalankan (Rusmita, 2016).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam arti sempit disebut sebagai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diperhatikan karena ada beberapa isu tentang keuangan daerah. Permasalahan yang muncul yaitu daerah kurang puas pada perlakukan pemerintah pusat dalam menentukan sumber data alam yang mempunyai potensi. Apabila maslah tersebut tidak disikapi maka akan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui Undang-Undangn Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kurniati, 2013).

Menurut Hutagalung, (2016) hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah serta mencari sumber daya yang dimiliki daerah utnuk mendukung seluruh kegiatannya. Salah satu konsep hubungan antara pusat dandaerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan, sehingga pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Keuangan daerah**

Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam konsep yang lebih luas, pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa aspek, yaitu pengelolaan sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan yang mungkin dilakukan, ditetapkannya Badan Eksekutif dan Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah, diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, dan didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis (Putera, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dianjurkan untuk menganut beberapa prinsip yaitu transaparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban public dalam proses penganggaran sampai pelaporan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidka hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut (Kaunang & Naukoko, 2016)

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Dalam masa desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD dalam rangka pembiayaan segala kegiatan untuk menciptakan infrastruktur yang dibutuhkan (Wandira, 2013).

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan oleh agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, agar tidak bergantung Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Pendapatan asli daerah merupkan salah satu modal dasar untuk pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merupakan salah satu usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapat dana dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah melimpahkan dana APBD untuk pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam hal ini, suatu daerah membudayakan potensi alam setempat agar lebih berguna untuk meningkatkan PAD (Sitompul, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

**Dana Perimbangan**

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Prasasti, 2013). Pemberian dana perimbangan melalui APBN mempunyai tujuan untuk masing-masing daerah. Tujuan tersebut yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiscal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah. Selain itu, dana perimbangan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. (Badjra et al., 2017).

Dana perimbangan dibagi menjadi empat jenis yaitu dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan provinsi. Sering dengan berjalannya waktu, dana alokasi khusus berkembnag menjadi 2 jenis yaitu dana alokasi fisik dan non fisik. Kedua jenis dana alokasi khusus tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Setiawan, 2017). Kesenjangan dari horizontal maupun vertical dapatatasi melalui dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dana lokasi khusus bertujuan untuk menjamin hal-hal yang dianggap penting pemerintah pusat. Dalam hubungan pemerintah pusat, adanya kebijakan desentralisasi diharpkan akan terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya bahwa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memeroleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar (Badjra et al., 2017)

**Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 11 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana bagian daerah meliputi pajak dan sumber daya alam (bukan pajak). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH bukan pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi (Wandira, 2013)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daearh dengan memperhatikan potensi daerah. Prosentase DBH yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan kegiatan di masing-masing daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Harahap, 2017).

Menurut Harefa (2018), DBH lebih berfungsi sebagai penyeimbang fiscal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan termasuk sebagai pengoreksi atas eksploitasi SDA. Daerah yang memiliki kekayaan SDA dan penghasilan pajak tinggi akan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

**Dana Alokasi Umum (DAU)**

Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemrintah pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pengertian dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari penghasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan sebagai pemerataan kemampuan keuangan diantara pemerintah daerah serta mewujudkan implementasi atas kebijakan desentralisasi (Suryana, 2018)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen dari pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DAU diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Selain itu DAU juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan daerah untuk masyarakat (Rachmawati, 2015)

Dana Alokasi Umum berasal dari APBN dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kuncoro (2004) DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 27, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal alokasi dasar. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

**Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang telah ditetapkan pada APBN. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 40 menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan tiga kriteria dalam penentuan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria untuk pengadaan barang-barang investasi atau fasilitas-fasilitas tertentu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat..

Kebijakan alokasi DAK diberikan sebagai salah satu cara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan yang menjadi priporitas nasional maupun daerah. Selain itu, kebijakan alokasi DAK diutamakan untuk membantu daerah yang mempunyai kemampuan keuangan di bawah rata-rata. Daerah dalam pembangunan juga diprioritaskan pada saat pengalokasian DAK (Nuryadin & Suharsih, 2017).

Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah masing-masing. Bentuk usulan kegiatannya dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu yang berbentuk program rencana pengeluaran tahunan. Bentuk usulan dapat berpedoman pada kebijakan instansi terkait. Dalam kegiatan yang diusulkan oleh daerah termasuk dalam kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan, maka pemerintah daerah membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai (Aditya & Maryono, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

**Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Selain itu, belanja daerah dapat dikatakan sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Harliza & Anitasari, 2017). Belanja daerah menurut pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyedia sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah dapat terlaksana jika pemerintah telah merencanakan program yang mendukung sumber penerimaan daerah (Gorahe Irdha Anisya Marsudi, Masinambow Vecky, 2012).

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada belanja pemerintah. belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksaaan kewenangan daerah. Jika kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi mengingkat. Belanja pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan operasi (Krismajay & Dewi, 2019).

Pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Pembiayaan tersebut dilakukan oleh pemerinah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dicapai dengan mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antar golongan dalam masyarakat karena perbedaan tingkat kepemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi (Deswantoro et al., 2017).

**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM dapat didefinisikan sebagai suatu indeks gabungan yang meliputi tiga kebutuhan dasar yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator ekonomi (Arini Sita, 2017). Indikator-indikator tersebut menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kepuasannya. IPM dapat menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sosial. Indeks tersebut merupakan ukuran yang menjelaskan berbagai indikator dan agregat pembangunan manusia. Indeks tersebut menentukan tingkat kesejahteraan individu yang nantinya akan menentukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Rasbin, 2012).

*United Nations for Development Program* (UNDP) mengartikan bahwa pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Manusia merupakan makhluk primer dan sarana utama dalam pembangunan. Indikator IPM menurut UNDP berkisar antara 0 hingga 100. Jika nilai IPM semakin tinggi mendekati 100 berarti nilai pembangunan manusia semakin baik. Indikator nilai IPM dibagi menjadi tiga golongan yaitu IPM < 50 (rendah), IPM 50 ≤ IPM < 80 (sedang/menengah), dan IPM ≥ 80 (tinggi) (Aditia & Dewi, 2015)

**Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian (Sitompul, 2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. PAD diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhhadap pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi PAD maka daerah semakin mampu melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar sehingaa kesejahteraan masayarakat akan terwujud.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rosita & Sutrisna, 2018) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bali yaitu pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Propinsi Bali.
3. (Arini Sita, 2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut berartu meningkatnya belanja modal akan memberi dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian (Deviani, 2016) tentang Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat) menujukkan bahwa hasil uji hipotesis terhadap rasio pertumbuhan belanja modal memperlihatkan hasil yang signifikan dengan arah hubungan yang positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin tinggi rasio pertumbuhan belanja modal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi sehingga kesejahteraan masyakarat juga akan meningkat.

**Kerangka Berpikir**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan meneliti tentang adanya kontribusi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Berikut tabel kerangka berpikirnya

1. Pendapatan Asli Daerah
2. DBH
3. DAU
4. DAK
5. Rasio belanja modal
6. Rasio belanja PDRB
7. Rasio pertumbuhan belanja modal

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian dan Populasi**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantititaif dengan data sekunder dengan data time series yaitu periode 2016-2018. Penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah berjumlah 29 kabupaten dan 6 kota.

**Sumber Data**

 Data yang diperoleh yaitu berupa data laporan realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Dari data ini akan diperoleh data mengenai PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, DAK, rasio belanja daerah, dan rasio belanja modal.. Kemudian data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah. Data laporan realisasi APBD bersumber dari Direktorat jenderal perimbangan keuangan. Selain itu data lain diperoleh melalui *website* berikut ini: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

**Operasional dan Pengukuran Variabel**

**Variabel Dependen**

Variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat yaitu variabel yang disebabkan/dipengaruhi oleh adanya variabel independent/variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM menurut UNDP berkisar antara 0 hingga 100. Jika nilai IPM semakin tinggi mendekati 100 berarti nilai pembangunan manusia semakin baik. Indikator nilai IPM dibagi menjadi tiga golongan yaitu IPM < 50 (rendah), IPM 50 ≤ IPM < 80 (sedang/menengah), dan IPM ≥ 80 (tinggi).

**Variabel Independen**

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahnnya atau timbul variabel dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Umum
4. Dana Alokasi Khusus
5. Rasio Belanja Modal
6. Rasio Belanja PDRB
7. Rasio pertumbuhan belanja modal.

Variabel independen tersebut berupa nominal dari masing-masing variabel yang ada di laporan realisasi anggaran masing-masing kabupaten/kota.

**Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda, bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa besar variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik yang digunakan dalam analisis regresi ini dengan menggunakan metode kuadrat terkecil/ *ordinary least squares* (Gujarati, 2003). Persamaan regresinya adalah :

**PE = α + ß1 X1+ ß2 X2+ ß3 X3 + ß4 X4 + ß5 X5 + ß6 X6 + ß7 X7 +** *e*

Keterangan :

TKM= Tingkat Kesejahteraan Masyarakat,

α = Konstanta,

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep,

X1 = PAD,

X2 = Dana bagi hasil (DBH),

X3= Dana Alokasi Umum (DAU),

X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK),

X5 = rasio belanja daerah,

X6 = rasio belanja terhdap PDRB,

X7 = rasio pertumbuhan belanja modal

*e* = error.

**Pengukuran variabel**

Rasio belanja modal = Realisasi Belanja Modal

 Total Belanja Daerah

 Rasio belanja daerah terhadap PDRB = Total Realisasi Belanja Daerah

 Total PDRB

 Rasio pertumbuhan belanja modal =

 Realisasi Belanja Modal th t -Realisasi Belanja Modal th t-1

Realisasi Belanja Modal th t-1

**Uji t**

Uji t berguna untuk membuktikan bahwa variabel bebas secara inidvidu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t juga digunakan untuk mengeatuhi makna dari koefisien parsial. Uji t tersebut dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistic thasil lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ttabel, maka hipotesis alternative diterima.

Ho: β = 0, variabel bebas tidak ada pengaruh parsial terhadap variabel terikat

Ha: β > 0, variabel bebas ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

Adapun kriteria pada uji t yaitu taraf signifikan sebesar 0,05%, apabila thitung<ttabel maka Ho diterima Ha ditolak, apabila thitung>ttabel maka Ho ditolak Ha diterima.

**Uji F**

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan memabandingkan antara nilai kritis Ftabel dengan nilai Fhitung yang terdapat pada tabel Analysis of Variance dari hasil perhitungan. Apabila Fhitung< Ftabel, maka Ho ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari regresi dapat menerangkan variabel terikat secara serentak. Apabila Fhitung<Ftabel, maka Ho diterima sehingga variabel bebas tidak perlu menjelaskan variabel terkait.

Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengeahui besarnya kontribusi variabel bebas dan variabel terikat. Hasil perhitungan R2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linier berganda.

* Apabila R2 mendekati 1, maka model semakin kuat dalam menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat.
* Apabila R2 mendekati 0, maka model semakin lemah dalam menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskripif**

Berdasarkan data yang diperoleh didapat deskripsi statistik yang dapat dilihat pada tabel berikut.

 **Tabel 1. Descriptive Statistic**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | Std.Deviation | N |
| IPM | 71,2299 | 4,47728 | 101 |
| PAD | 308684778571,0396 | 227099202123,94366 | 101 |
| DBH | 118904109559,0990 | 602633957272,80920 | 101 |
| DAU | 958467324508,2278 | 298191529858,43260 | 101 |
| DAK | 277346533662,6436 | 171525984863,03384 | 101 |
| Rasio Belanja Modal | ,1776 | ,05707 | 101 |
| Rasio Belanja PDRB | ,1088 | ,04134 | 101 |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Modal | ,2151 | ,81749 | 101 |

Berdasarkan tabel di atas N menyatakan jumlah data yang valid. Valid artinya data yang ada atau terisi. Dalam data tersebut jumlah data yang valid sebanyak 101. Mean menyatakan nilai rata-rata dari sebuah data. Nilai rata-rata untuk IPM sebesar 71,2299; nilai rata-rata PAD sebesar 308684778571,0396; nilai rata-rata DBH sebesar 118904109559,0990; nilai rata-rata DAU sebesar 958467324508,2278; nilai rata-rata DAK sebesar 277346533662,6436; nilai rata-rata rasio belanja modal sebesar 0,1776; nilai rata-rata rasio belanja terhadap PDRB sebesar 0,1088, dan nilai rata-rata rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 0,2151.

Standar deviation menyatakan simpangan baku yaitu akar dari variansi. Data di atas menunjukkan bahwa Nilai standar devation untuk IPM sebesar 4,47728; nilai standar devation PAD sebesar 227099202123,94366; nilai standar devation DBH sebesar 602633957272,80920; nilai standar devation DAU sebesar 298191529858,43260; nilai standar devation DAK sebesar 171525984863,03384; nilai standar devation rasio belanja modal sebesar 0,0507; nilai standar devation rasio belanja terhadap PDRB sebesar 0,04134, dan nilai standar devation rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 0,81749.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Heterokesdasitas**

**Tabel 2. Uji Heterokesdasitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficient | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| (Constant) | 80,550 | 2,070 |  | 38,908 | ,000 |
| PAD | 1,011E-011 | ,000 | ,513 | 6,021 | ,000 |
| DBH | -1,106E-012 | ,000 | -,149 | -1,156 | ,250 |
| DAU | -9,317E-012 | ,000 | -,620 | -5,844 | ,000 |
| DAK | -7,121E-013 | ,000 | -,027 | -,221 | ,826 |
| Rasio Belanja Modal | -2,493 | 6,072 | -,032 | -,411 | ,682 |
| Rasio Belanja terhadap PDRB | -25,706 | 8,756 | -,237 | -2,936 | ,004 |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Modal | ,271 | ,426 | ,049 | ,636 | ,526 |

Uji heterokesdasitas adalah bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006).

Berdasarkan tabel 2 di atas, koefisien parameter untuk variable independent DBH, DAK, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan belanja modal tidak signifikan pada 0,01 yang berarti tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan variable PAD, DAU, dan rasio belanja terhadap PDRB ternyata secara statistik pada 0,01 yang berarti terdapat heteroskedastisitas.

**Uji Statistik t**

Uji statistik t dilakukan untuk menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t*)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficient | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| (Constant) | 80,550 | 2,070 |  | 38,908 | ,000 |
| PAD | 1,011E-011 | ,000 | ,513 | 6,021 | ,000 |
| DBH | -1,106E-012 | ,000 | -,149 | -1,156 | ,250 |
| DAU | -9,317E-012 | ,000 | -,620 | -5,844 | ,000 |
| DAK | -7,121E-013 | ,000 | -,027 | -,221 | ,826 |
| Rasio Belanja Modal | -2,493 | 6,072 | -,032 | -,411 | ,682 |
| Rasio Belanja terhadap PDRB | -25,706 | 8,756 | -,237 | -2,936 | ,004 |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Modal | ,271 | ,426 | ,049 | ,636 | ,526 |

Uji statistik t bertujuan untuk mengintepretasikan koefisien parameter variable independent. Variable dikatakan signifikan terhadap variable dependen jika nilai signifikansi di bawah 0,05. Dari table di atas menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan Rasio Belanja terhadap PDRB signifikan terhadap variable tingkat kesejahteraan masyaarakat. Hal tersebut terjadi karena nilai variable PAD yaitu 0,000; nilai variable DAU yaitu 0,000; dan nilai rasio belanja terhadap PDRB yaitu 0,004. Ketiga nilai variable tersebut berada di bawah 0,05. Variable DBH, DAK, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan belanja modal berada jauh di atas 0,05. Nilai DBH sebesar 0,250; nilai DAK sebesar 0,826; nilai rasio belanja modal sebesar 0,682; dan nilai rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 0,526. Oleh karena itu, variable DBH, DAK, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan belanja modal tidak signifkan terhadap variable tingkat kesejahteraan masyarakat.

**Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)**

Uji statistik F dilakukan untuk menguji secara simultan pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Tabel ANOVAa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Regression | 1079,836 | 7 | 154,262 | 15,514 | ,000b |
| Redisual | 924,765 | 93 | 9,944 |  |  |
| Total | 2004,600 | 100 |  |  |  |

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variable dependen. Pengujian hipotesis ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah variable dependen secara linier berhubungan dengan variable independent.

Berdasarkan tabel diatas yang dapat dilhat dari tabel ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 15,514 dengan probabilitas 0,000. Oleh karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variable independent tidak sama dengan nol. Hal tersebut membuktikan bahwa variable independent Rasio pertumbuhan belanja modal, DBH, PAD, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja terhadap PDRB, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat..

**Koefisien Determinasi (R Square)**

Koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Hasil Koefisien determinasi**

**Model Summaryb**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistic |
| R Sqaure | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | 0,734 | 0,539 | 0,504 | 3,15336 | 0,539 | 15,514 | 7 | 93 | 0,000 |

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independent dalam menjelaskan variasi variable dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.

Dalam penelitian ini, R square mempunyai nilai 0,539 yang berarti variable-variabel independent memberikan informasi yang dibutuhkan oleh variable dependen. Hal ini berarti 5,3% variasi tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variable Rasio pertumbuhan belanja modal, DBH, PAD, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja terhadap PDRB, DAU, DAK. sisanya 94,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. *Standard error of estimate* (SEE) menunjukkan angka sebesar 3,15336. Semakin kecil nilai SEE, maka model regresi akan semakin tepat dalam memprediksi variable dependen.

**Pembahasan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Sitompul, 2017) yang menjelaskan bahwa semakin besar kontribusi PAD maka daerah semakin mampu melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar sehinga kesejahteraan masayarakat akan terwujud.

Dana perimbangan terbagi menjadi DBH, DAU, dan DAK. Dalam penelitian (Rosita & Sutrisna, 2018), menujukkan hasil penelitiannya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun dalam penelitian ini berbeda hasilnya. Hasil dari penelitian ini, ketiga variabel terebut ternyata tidak semuanya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hanya variabel DAU saja yang hasilnya berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena DAU merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan di daerah yang digunakan untuk tujuan desentralisasi. DAU dinilai lebih mencerminkan adanya kesejahteraan masayarakat dibandingkan dengan DAK dan DBH yang hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

Pengaruh belanja terhadap kesejahteraan dalam penelitian ini diwujudkan pada rasio belanja modal, rasio belanja PDRB, rasio pertumbuhan belanja modal. Dari ketiga variabel terebut, ternyata hanya rasio belanja PDRB saja yang berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel rasio belanja modal dan rasio petumbuhan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deviani, 2016).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan hasil peneltiian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kontribusi ketiga variabel tersebut pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan rasio belanja PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal tersebut telah mendukung beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan simpulan di atas, pemeliti memberikan bebrapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

Penelitian ini menggunakan data time series selama empat tahun dari tahun 2015-2018. Sebaiknya dipenelitian yang akan datang menggunakan data time series yang lebih panjang, bisa 5 tahun atau 10 tahun, sehingga hasil analisis data akan lebih akurat dan tepat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggali potensi-potensi dan sumber daya yang terdapat di masing-masing daerah agar dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplore kontribusi PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah lain untuk mendukung beberapa penelitian yang sudah ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aditia, N. M. A., & Dewi, N. P. M. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Ngakan Made Agung Aditia 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unversitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Pendahuluan Pembukaan Uud 1945 Mengamanatkan Bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Ind. *E-Jurnal EP Unuud, 7*, *7*(2), 212–242.

Aditya, D. M. E., & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal ( Studi Pada Provinsi / Wilayah Kalimantan Dan Sulawesi ). *Prosiding SENDI*, (33), 978–979.

Arini Sita, P. R. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. *085228282256*, *2*(2), 180–198. https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284

Badan Anggaran DPR RI. (2017). Laporan Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPR-RI Ke Provinsi Jawa Tengah.

Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abundanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.

Deswantoro, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *6*(3), 187. https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256

Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Pekbis Jurnal*, *8*(1), 1–13.

Gorahe Irdha Anisya Marsudi, Masinambow Vecky, E. D. (2012). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi sulawesi utara. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado*, 1–12.

Harahap, R. U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. *Kitabah*, *1*(1). Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004

Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Penerimaan Daerah Dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. *Pajak Daerah*, *9*(2), 147–160.

Harliza, T., & Anitasari, M. (2017). Analisis Belanja Daerah Kabupaten/kota di Bengkulu. *Ekombis Review*, *5*(2), 133–140.

Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *42*(1), 1. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137

Kaunang, C. E., & Naukoko, A. T. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *16*(2), 355–365.

Krismajay, I. P., & Dewi, N. P. M. D. (2019). Pengaruh Belanja Daerah Dan Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unuud, 8*, *8*(6), 1390–1422.

Kurniati, P. S. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Danpemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, *3*(1), 1–12.

Kustianingsih, N., & Muslimin dan Abdul Kahar. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, *6*(6), 82–91.

Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2017). Analisis Dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan Di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *18*(1). https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954

Prasasti, S. E. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017-2013). *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–13.

Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Di Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Sosiohumaniora*, *18*(3), 261–269. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075

Rachmawati, M. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Di Provinsi Papua dan Papua Barat).

Rasbin. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Tujuh Provinsi Pemekaran di Indonesia. *Kajian*, *17*(4), 491–513.

Ratnadi, N. M. D., Ariyanto, D., & Wirawati, N. G. P. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, *11*(1), 1–13.

Rosita, I. A., & Sutrisna, I. K. (2018). Pengaruh. Pendapatan Asli. Daerah Dan Dana. Perimbangan Terhadap. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan. Masyarakat Pada. Kabupaten/Kota Di. Provinsi. *E-Jurnal EP Unud*, *7*(7), 1445–1471.

Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, *5*(3), 237. https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083

Setiawan, M. I. (2017). Implementasi Dana Aspirasi di Indonesia Abstrak/Abstrac. *Defis*, *I*(1), 33–47. Retrieved from http://www.djpk.kemenkeu.go.id

Sitompul, M. A. L. (2017). Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, *1*(1), 1–10. Retrieved from http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/547

Suranta, S., Bandi, Syafiqurrahman, M., & Perdana, H. D. (2018). Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan , Otonomi Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemeruntah Daerah: Studi pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, *6*(2), 144–154. https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.671

Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, *9*(2), 67–74.

Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, *2*(1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jrak*, *7*(1), 11–21.